

BAB I

PENDAHULUAN

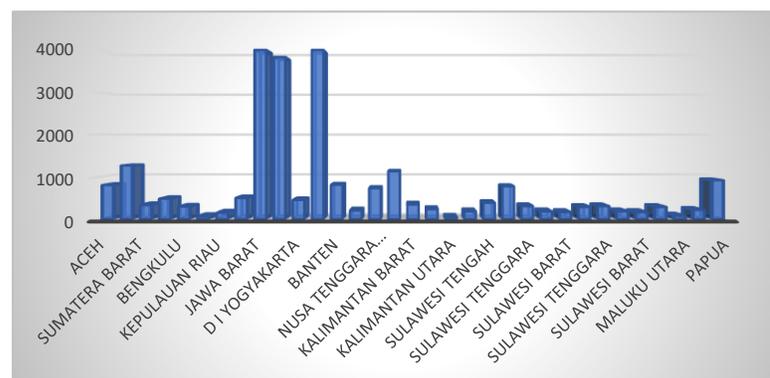
1.1 Latar Belakang

Kemiskinan dalam arti luas berarti ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya secara relatif sesuai dengan persepsi dirinya. Di masing – masing negara permasalahan kemiskinan telah menjadi isu dan tantangan secara global. Kemiskinan telah dijelaskan dengan banyak cara, berubah dari suatu tempat ketempat lain dan lintas waktu, (*World Bank, 1995*). Kemiskinan adalah keadaan atau kondisi dimana seseorang kekurangan sumber daya keuangan dan kebutuhan pokok untuk setandar hidup, kemiskinan dapat memiliki sebab dan akibat sosial, ekonomi, dan politik yang beragam. Kemiskinan juga menjadi salah satu masalah utama bagi pembangunan ekonomi dan kemiskinan ini menjadi salah satu pokok pembahasan paling utama dalam pembangunan. Pencapaian berhasil atau tidaknya pembangunan itu bisa diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001).

Oleh karena itu terdapat dampak negatif dari kemiskinan yaitu timbulnya masalah sosial yang mempengaruhi pembangunan ekonomi negara, masalah kemiskinan ini hampir dialami oleh setiap negara di dunia terutama negara yang berkembang. Indonesia adalah salah satu negara berkembang. Di negara berkembang seperti Indonesia ini sudah lazim apabila terjadi permasalahan kompleks yang salah satunya

yaitu kemiskinan. Kemiskinan patut menjadi salah satu agenda yang harus diperhatikan karena kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi dalam mencapai suatu tujuan pembangunan nasional. Kemiskinan juga menjadi pekerjaan yang perlu di selesaikan oleh pemerintah Indonesia karna dari kemiskinan ini bisa saja muncul masalah-masalah sosial lainnya seperti anak jalanan yang kebanyakan putus sekolah, tingkat kejahatan, pemukiman yang kumuh dan lain sebagainya. Oleh karena itu kemiskinan menjadi salah satu target pembangunan yang juga perlu dievaluasi secara berkala. Kemiskinan menjadi masalah besar sepanjang sejarah di Indonesia sebagai sebuah negara. Menurut data BPS presentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57 persen atau 26,37 juta orang. Posisi itu naik sebesar 0,03 persen dari Maret 2022 yaitu 26,16 juta orang miskin. hal ini disebabkan oleh peningkatan angka pengangguran yang diakibatkan oleh adanya pandemi.

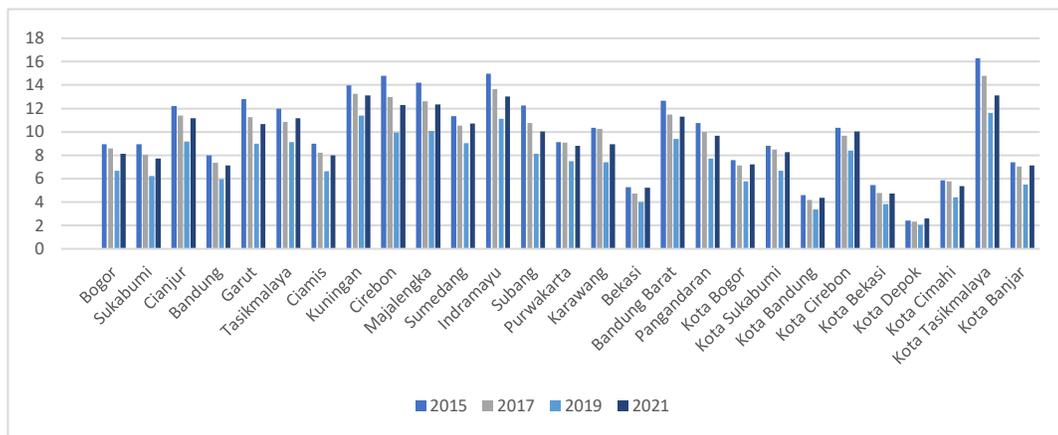
Menurut Sukirno (2006), semakin meningkatnya tingkat pengangguran makan akan mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga akan berimbas pada pertambahan angka kemiskinan. Berikut adalah data jumlah penduduk miskin menurut Provinsi di Indonesia.



Sumber: Kemiskinan dan ketimpangan(BPS)

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak Menurut Provinsi di Indonesia 2022

Jika dilihat dari data tersebut, ada beberapa Provinsi yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi, salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi atau wilayah terpadat di Indonesia. Di Provinsi Jawa Barat juga masih terdapat wilayah-wilayah yang berada dibawah garis kemiskinan.



Sumber : BPS Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat dan diolah

Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Miskin

Dari gambar 1.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat di tahun 2015 hingga 2019 cenderung mengalami penurunan, namun di tahun 2021 persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dikarenakan adanya pandemi covid-19. Kota Depok salah satu daerah yang memiliki persentase

penduduk miskin yang rendah yaitu sebesar 2.58 persen. sedangkan Kota Tasikmalaya merupakan daerah yang memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi di tahun 2021 yaitu sebesar 13.13 persen.

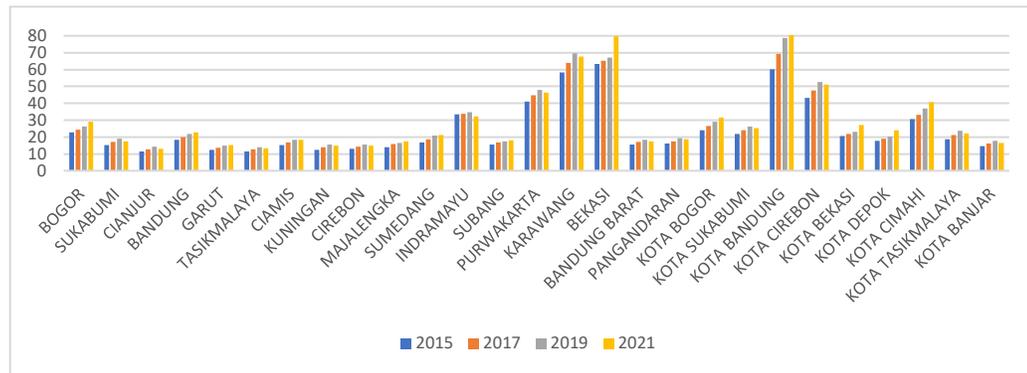
Adanya kemiskinan dipengaruhi juga oleh adanya ketimpangan pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduk yang disebut dengan distribusi pendapatan nasional. Menurut Sukirno pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Pendapatan nasional bisa berupa Produk Domestik Bruto atau PDB (*Gross Domestic Product atau GDP*) dan Produk Nasional Bruto atau PNB (*Gross National Product atau GDP*). Secara umum kemajuan suatu negara atau daerah biasanya diukur dari pertumbuhan ekonominya.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pemerintah disuatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi di suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota menggunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau sektor dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. sementara PDRB konstan digunakan

untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDRB Per Kapita dapat menyebabkan kemiskinan karena pendapatan masyarakat di suatu wilayah dapat diukur dari pendapatan per kapita. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Simanjuntak, 2001).

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki 27 Kabupaten/Kota dan memiliki beragam potensi ekonomi mulai dari industri pengolahan, perdagangan, pertanian hingga jasa-jasa. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perekonomian Provinsi Jawa Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai Rp.2.088,04 triliun dan Rp.41,8 juta untuk PDRB per kapita. Di tahun 2020 ekonomi Jawa Barat berkontraksi 2,44 persen menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,07 persen. dari sisi pengeluaran komponen perubahan inventori mengalami pertumbuhan terendah yaitu sebesar -62,35 persen. adapun dari sisi produksi, pertumbuhan terendah dicapai oleh lapangan usaha jasa perusahaan sebesar -18,38 persen (Badan Pusat Statistik).



Sumber: BPS PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Kostan Menurut Kabupaten / Kota Jawa Barat (Ribu Rupiah) 2015– 2021 dan diolah

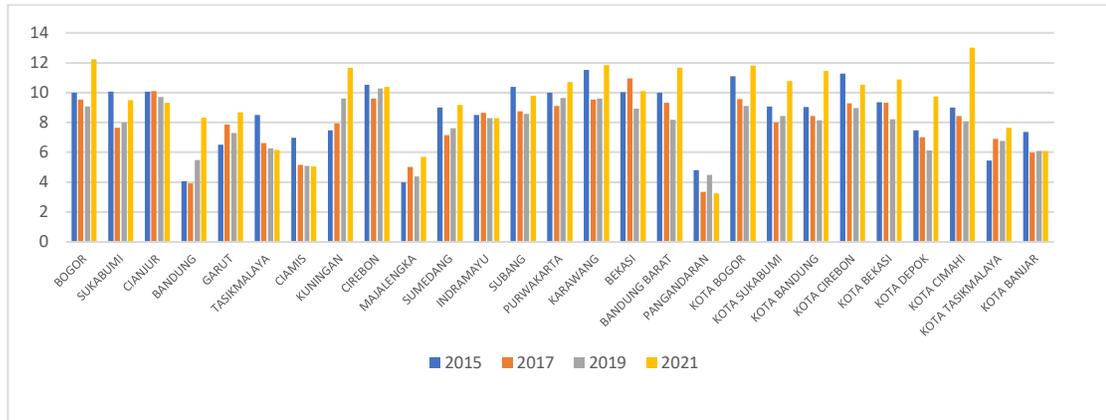
Gambar 1. 3 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Kostan Menurut Kabupaten / Kota Jawa Barat (Ribu Rupiah) 2015– 2021

Berdasarkan gambar 1.3 diatas, PDRB Per kapita atas dasar harga konstan cenderung mengalami peningkatan. Kota Bandung merupakan daerah yang tingkat PDRB Per kapita nya tinggi yaitu sebesar 81.704 tahun 2021. sedangkan Kabupaten cianjur merupakan daerah yang PDRB Per kapita nya rendah yaitu sebesar 13.124 tahun 2021. Pendapatan per kapita juga dapat menurun apabila masalah pengangguran tidak ditanggulangi sehingga dapat menyebabkan kerugian ekonomi, karena tingginya tingkat pengangguran menambah biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah.

Faktor lain penyebab terjadinya kemiskinan yaitu pengangguran. Ada hubungan yang sangat erat antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran mengganggu kemajuan sosial, terutama pertumbuhan ekonomi, meningkatkan secara umum hilangnya kesejahteraan dalam hal produktivitas, sehingga membawa pendapatan yang lebih rendah (Yasufu, 2005).

Salah satu karakteristik pengangguran di Jawa Barat adalah pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Pengangguran Terbuka merupakan penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi ia tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah mendapatkan pekerjaan namun belum mulai bekerja. Jumlah pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia yang dimana penduduknya memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan untuk sehari-hari. Yang artinya dimana semakin tinggi pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan.

Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat berhubungan erat dengan lapangan pekerjaan. Banyaknya lapangan pekerjaan akan sangat berdampak pada jumlah penganggura disuatu wilayah, dengan kata lain lapangan kerja yang terbatas dapat menyebabkan angkatan kerja yang tersedia tidak mendapatkan pekerjaan. Dari keterbatasan untuk membiayai kehidupan sehari-hari itu akan menimbulkan masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat mengatakan, tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada Agustus 2021 berkurang sebanyak 102,9 ribu orang. Dengan kata lain, tingkat Pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat turun sebesar 0,64 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut sebagian besar disumbangkan oleh TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu sebesar 16,71 persen.



Sumber: Dinasker Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Jawa Barat

Gambar 1. 4 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (PTPT) di Kabupaten/Kota Jawa Barat 2015-2021

Dari gambar 1.4 diatas persentase tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat di tahun 2021 cenderung naik. Kota Cimahi merupakan daerah yang memiliki persentase tingkat pengangguran terbuka nya tinggi yaitu sebesar 13.03 persen pada tahun 2021. Sedangkan Kabupaten Pangandaran merupakan daerah yang persentase tingkat pengangguran terbuka nya rendah yaitu sebesar 3.25 persen pada tahun 2021.

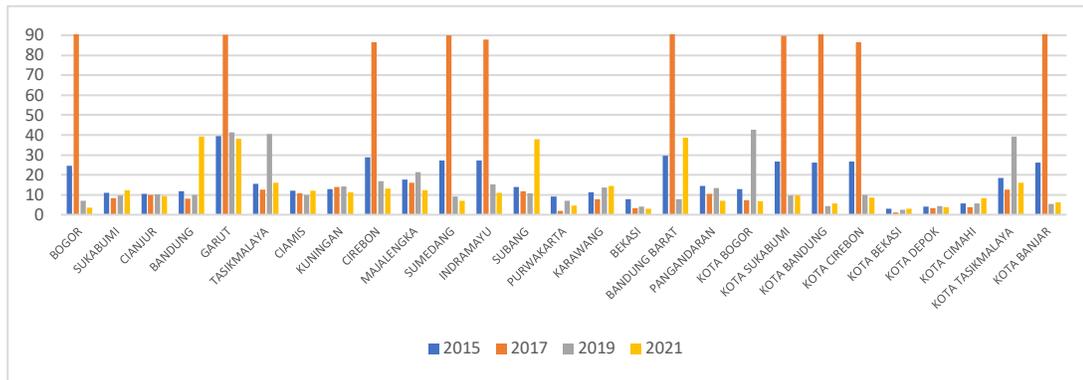
Jika pengangguran tidak diatasi maka kemiskinan akan terus meningkat. Ada beberapa cara yang bisa meminimalisir tingkat kemiskinan, seperti membangun pendidikan yang bermutu yang bisa diakses oleh berbagai kalangan khususnya kalangan menengah kebawah, meningkatkannya pelayanan kesehatan, dan masih banyak lainnya. Pemerintah juga memiliki serangkaian kebijakan kesejahteraan yang

dituangkan kedalam program bantuan sosial untuk masyarakat. Program sosial yang telah diberikan yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Program-program ini bertujuan untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Kartu Indonesia Pintar atau KIP yaitu implementasi dari Program Indonesia Pintar (PIP). KIS sangat dibutuhkan oleh mereka siswa-siswa yang berasal dari kalangan keluarga miskin yang sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah, hal tersebut disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga membuat siswa tersebut harus berhenti sekolah dan memilih untuk bekerja. Sasaran utama penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah anak-anak yang orang tuanya memiliki keterbatasan ekonomi atau kalangan menengah kebawah sehingga tidak bisa untuk membiayai anaknya sekolah. Kebijakan kesejahteraan salah satunya dalam pendidikan yang di rilis oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk menekan angka putus sekolah adalah Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai upaya bagi pemerintah dalam mengatasi rendahnya akses pendidikan yang disebabkan oleh permasalahan kemiskinan yang sampai sekarang masih belum terselesaikan. Adapun Kartu Indonesia Sehat atau KIS adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunaanya sendiri dapat menggunakan fungsi dari KIS di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu KIS ini merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS.

Ada dua golongan kategori peserta BPJS yaitu golongan non PBI atau peserta yang dipindahkan dari program Asuransi kesehatan dengan iuran bulanan yang dibayar sendiri atau mandiri. Selanjutnya ada golongan Peserta Bantuan Iuran (PBI) dengan identitas Kartu Indonesia Sehat (KIS), Peserta dalam program ini di khususkan untuk fakir miskin dan warga yang kurang mampu yang dimana iurannya dibayar oleh pemerintah. Program KIS ini dalam pelaksanaannya ditujukan agar dapat menjamin dan memastikan bahwa masyarakat miskin mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan yang sama seperti yang diselenggarakan dalam pelayanan kesehatan pada program BPJS (Anggriana 2017). Program selanjutnya ada Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS yang awal diluncurkannya dinamai dengan nama Kartu Pelindung Sosial (KPS) yang dimana bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk tunai. Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera. Program simpanan keluarga sejahtera bagi mereka pemegang KKS merupakan program pemberian bantuan non tunai dalam bentuk simpanan yang diberikan pemerintah kepada keluarga kurang mampu. Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS mempunyai banyak sekali keunggulan dalam menyalurkan bantuan sosial. Keunggulan yang dimiliki oleh Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu memiliki fitur keuangan dan tabungan, sehingga dapat digunakan untuk penarikan bantuan sosial. Dengan menggunakan sisten penyaluran yang dikendalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Dalam penyaluran bantuan sosial program ini dinilai sangat efektif dan tepat sasaran. Berikut ini menunjukkan data-data dari

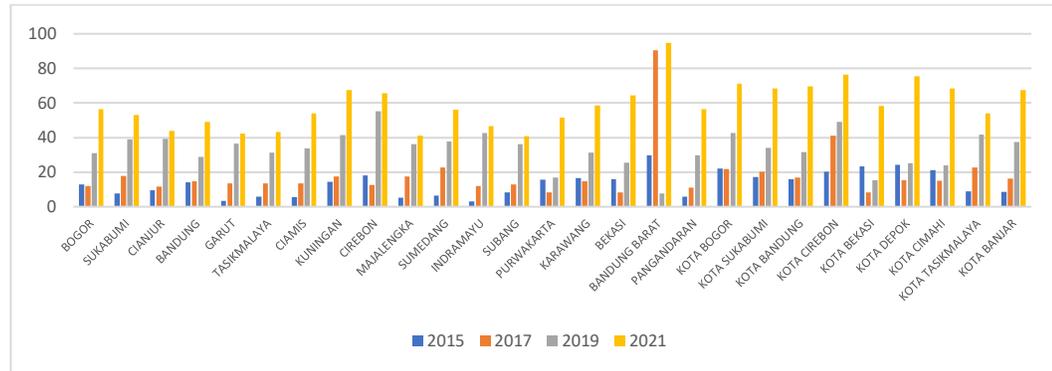
program sosial KIP, KIS, dan KKS menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015-2021.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat (BPS) dan diolah

Gambar 1. 5 Persentase Rumah Tangga Yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Barat 2015-2021

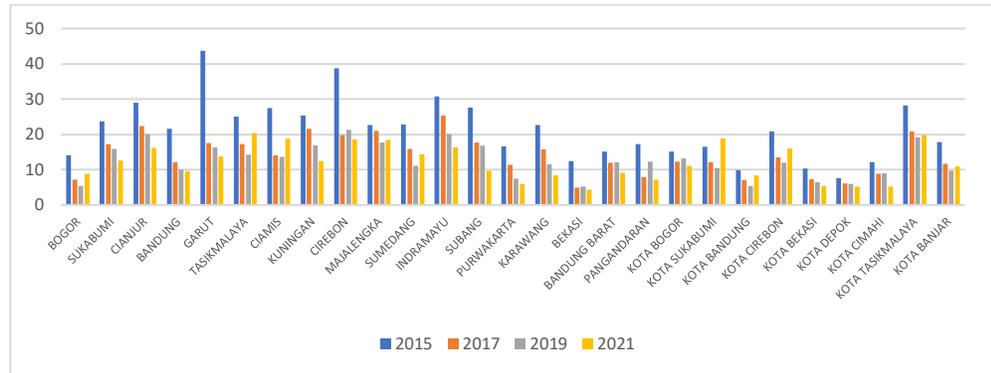
Berdasarkan gambar 1.5 diatas persentase rumah tangga yang menerima program Indonesia Pintar atau kartu indonesia pintar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat di tahun 2015 hingga 2017 mengalami kenaikan namun dari tahun 2019 hingga 2021 cenderung mengalami penurunan. Kabupaten Bandung merupakan daerah yang persentase rumah tangga yang menerima program Indonesia Pintar atau kartu indonesia pintar nya tinggi yaitu sebesar 39.19 persen pada tahun 2021. Sedangkan Kabupaten Bekasi dan Kota bekasi memiliki persentase yang sama sebagai daerah yang persentase rumah tangga yang menerima program Indonesia Pintar atau kartu indonesia pintar nya rendah yaitu sebesar 3.07 persen pada tahun 2021.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat (BPS) dan diolah.

Gambar 1. 6 Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Barat 2015-2021

Berdasarkan gambar 1.6 diatas persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan BPJS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015 hingga 2021 mengalami kenaikan. Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah yang persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan BPJS nya tinggi yaitu sebesar 94.7 persen di tahun 2021. Sedangkan Kabupaten Subang merupakan daerah yang persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan BPJS nya rendah yaitu sebesar 40.93 persen di tahun 2021.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat dan diolah

Gambar 1. 7 Persentase Rumah Tangga Yang Menerima Kartu Keluarga

Sejahtera (KKS) Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Barat 2015-2021

Berdasarkan gambar 1.7 diatas persentase rumah tangga yang menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami penurunan dari tahun 2015-2021. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang persentase rumah tangga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) nya tinggi yaitu sebesar 20.38 persen pada tahun 2021. Sedangkan Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang persentase rumah tangga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) nya rendah yaitu sebesar 4.25 persen.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Pendapatan Per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Program Pemerintah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2015-2021 “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran terbuka, dan program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan per kapita, tingkat pengangguran terbuka, dan program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi dan pengaruh pendapatan per kapita, tingkat pengangguran terbuka dan pelaksanaan program sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu kartu Indonesia pintar (KIP), Kartu Indonesia sehat (KIS) dan Kartu keluarga Sejahtera (KKS) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten / kota di Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain yaitu :

1. Manfaat Praktis

- a) Untuk penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan yang lebih luas dan menambah ilmu pengetahuan tentang efektivitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) Dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Kabupaten / Kota Jawa Barat.
- b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi masyarakat akan permasalahan yang terjadi di dalam program dari segi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mengatasi permasalahan yang ada.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan di bidang kajian ilmu ekonomi, terutama kajian yang mengenai analisis pengaruh sosial (KIP, KIS, KKS) terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten / Kota di Jawa Barat .